



# LAPORAN KINERJA

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SETDA PROVINSI PAPUA  
Tahun Anggaran 2023

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di Pemerintah Provinsi Papua. Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena pengadaan barang/jasa sangat ditentukan oleh komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi

Papua tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance, dan Clean Government



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN ESEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Umum Organisasi .....	3
C. Sistematika Penyajian .....	9
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>12</b>
A. Rencana Strategis.....	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	16
C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.....	18
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI</b> .....	<b>20</b>
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2023.....	20
B. Analisis Capaian Kinerja .....	22
C. Capaian Kinerja Lain.....	43
D. Realisasi Anggaran .....	54
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2023. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2023 memiliki 4 (empat) sasaran strategis dengan total 7 (tujuh) indikator target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 26 (dua puluh enam) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 4 target; dan
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 2 target:

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing- masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Sasaran Strategis 1.</b>				
Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa yang memenuhi kaidah Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)				
1.	Persentase Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	100 %	96,90%	96,90%
2.	Persentase efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilihan PBJ	6 %	17,86 %	297,67%
<b>Sasaran Strategis 2.</b>				
Meningkatnya pemanfaatan layanan SPSE pengadaan secara eletronik				
1	Meningkatnya pemanfaatan layanan SPSE pengadaan secara eletronik	100 %	100%	100%
<b>Sasaran Strategis 3.</b>				
Meningkatnya Profesional SDM pengelola PBJ				
1	Persentase keterisian Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	60%	60%%	100%
2	Mempertahan Tingkat capaian	Proaktif	Proaktif	100%

	Kematangan UKPBJ			
3	Persentase Sanggahan/ pengaduan yang terselesaikan	100%	92,31%	92,31%
<b>Sasaran Strategis 4.</b> Meningkatnya Auntabilitas Kinerja Biro PBJ Prov.Papua				
1	Hasil SAKIP Biro PBJ Setda Prov.Papua	BB	BB*	100%

Kinerja keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2023 menunjukkan realisasi sebesar Rp. Rp. 31.854.209.521,- atau 97,70% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 32.605.495.650,-.

Capaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah *instrument* yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan amanat yang telah tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dan sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja yang disusun adalah menyampaikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target dan membandingkan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra).

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang telah disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Kinerja dimaksud merupakan hasil dari proses yang berupa rencana kinerja tahunan. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses yang dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan serta kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian

kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan.

## **B. Gambaran Umum Organisasi**

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua sebagai berikut :

### **a. Tugas**

Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1 Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 yaitu menyiapkan bahan perumusan pembinaan dan petunjuk teknis, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Papua.

### **b. Fungsi**

Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Biro;
- b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;

- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengembangan pengelolaan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan analisis hukum dan jawaban terhadap sanggahan calon penyedia barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- h. penyelenggaraan ketatausahaan Biro;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro; dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan

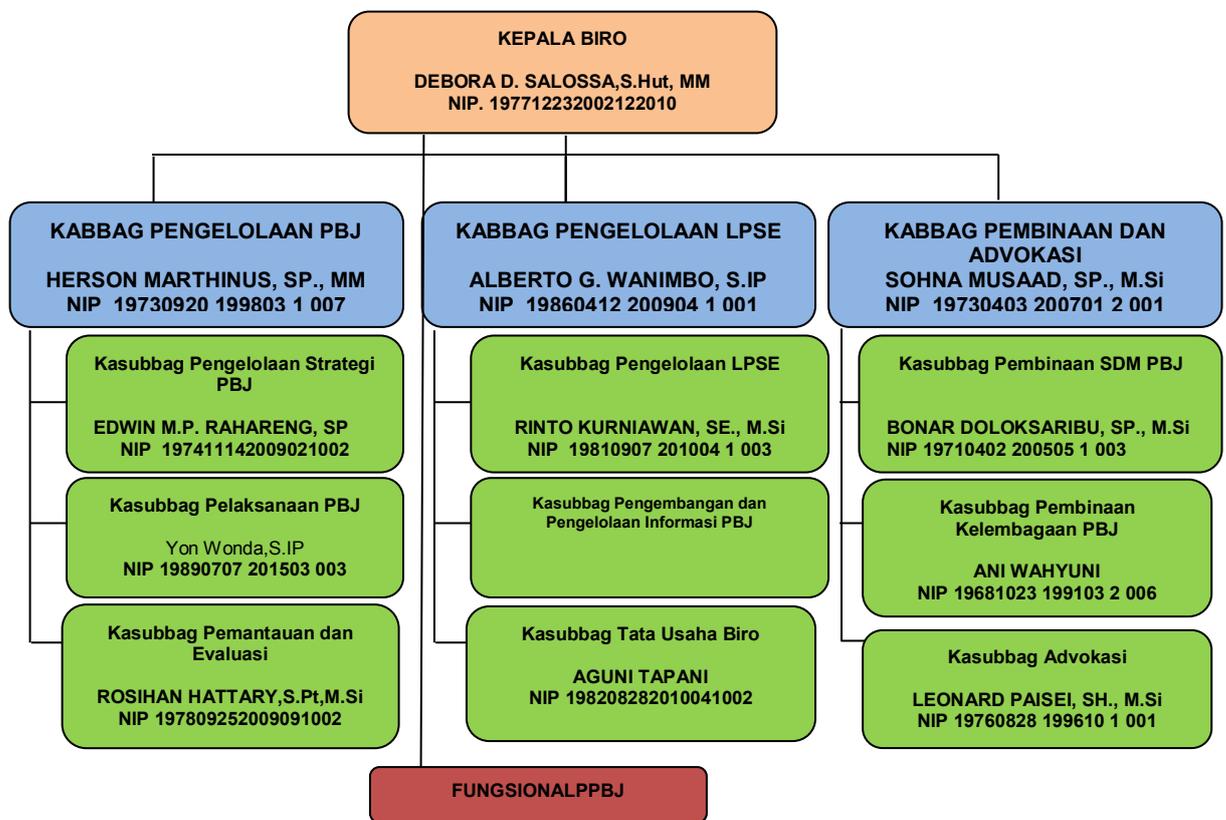
Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua terdiri dari :

- 1. Kepala Biro.
- 2. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
  - 1. Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa.
  - 2. Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
  - 3. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.
- 3. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
  - 1. Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
  - 2. Subbagian Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
  - 3. Subbagian Tata Usaha Biro.

4. Bagian Pembinaan dan Advokasi

- Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa.
- Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- Subbagian Advokasi.

Struktur jabatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua sebagai berikut :



Bagan Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tahun 2023

Sumber Daya Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tahun 2023 meliputi Sumberdaya Aparatur dan Sumberdaya Sarana Prasarana sebagai berikut :'

**a. Sumber Daya Aparatur**

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dukung oleh 74 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 18 Tenaga Honorer. Rincian latar belakang pendidikan, golongan dan eselonisasi ASN pada Biro PBJ di tampilkan pada tabel-tabel berikut :

**Tabel. 1.1.**

Daftar Jumlah Aparatur Sipil Negara  
Per Golongan dan Jabatan Tahun 2023

GOLONGAN RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	FUNGSIONAL	STAFF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/c	-	1	-	-	-	-	1
Golongan IV/b	-	-	2	-	0	1	3
Golongan IV/a	-	-	1	2	4	4	11
Golongan III/d	-	-	-	3	9	6	18
Golongan III/c	-	-	-	3	13	5	21
Golongan III/b	-	-	-	-	7	5	12
Golongan III/a	-	-	-	-	2	-	2
Golongan II/d	-	-	-	-	-	1	1
Golongan II/c	-	-	-	-	-	3	3
Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/a	-	-	-	-	-	2	2
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	3	8	35	27	74

**Sumber Data** : Sub Bagian Tata Usaha Biro PBJ

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah jabatan fungsional Pengelola Pengadaan barang dan Jasa sampai dengan Tahun 2023 yang telah dilantik dan bestatus permanen pada Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi Papua sebanyak 35 orang.

**Tabel. 1.2.**

Daftar Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan  
Tingkat Pendidikan Tahun 2023

NO	URAIAN PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN					JUMLAH
		SMP	SMA	D-III	S-1	S-2	
1.	Juru Muda (Ia)	0	0	0	0	0	0
2.	Juru Muda Tingkat I (Ib)	0	0	0	0	0	0
3.	Juru (Ic)	0	0	0	0	0	0
4.	Juru Tingkat I (Id)	0	0	0	0	0	0
5.	Pengatur Muda (IIa)	0	2	0	0	0	2

6.	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	0	0	0	0	0	0
7.	Pengatur (IIc)	0	3	0	0	0	3
8.	Pengatur Tingkat I (IId)	0	1	0	0	0	1
9.	Penata Muda (IIIa)	0	0	2	0	0	2
10.	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	0	0	3	8	1	12
11.	Penata (IIIc)	0	0	3	15	3	21
12.	Penata Tingkat I (IIId)	0	0	0	13	5	18
13.	Pembina (IVa)	0	0	0	0	11	11
14.	Pembina Tingkat I (IVb)	0	0	0	0	3	3
15.	Pembina Utama Muda (IVc)	0	0	0	0	1	1
16.	Pembina Utama Madya (IVd)	0	0	0	0	0	0
17.	Pembina Utama (IVe)	0	0	0	0		0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>74</b>

**Sumber Data:** Sub Bagian Tata Usaha Biro PBJ

SDM ASN Biro Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah jenjang strata dua sebanyak 36 ASN dan strata satu sebanyak 24 ASN, sedangkan jenjang D3 sebanyak 8 ASN dan SLTA sebanyak 6 ASN. Berdasarkan data diatas diharapkan dengan tingkat pendidikan yang ada sangat mempengaruhi kinerja pelayanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Papua.

Berdasarkan jenjang kepangkatan/golongan ruang terbanyak adalah pada Golongan III sebanyak 53 ASN, Golongan IV sebanyak 15 ASN, dan Golongan II sebanyak 6 ASN.

**Tabel. 1.3.**

Daftar Jumlah Aparatur Sipil Negara per Jenis Kelamin  
Tahun 2023

JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSEN
LAKI-LAKI	52	70,27
PEREMPUAN	22	29,73
TOTAL	74	100

**Sumber Data:** Sub Bagian Tata Usaha Biro PBJ

#### **b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Sarana prasarana/asset yang dimiliki oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua meliputi asset peralatan dan mesin sebagai berikut :

Tabel 1.4

Daftar Aset Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi  
Papua Menurut Jenis dan Tahun Pengadaan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian
1	Scanner	Plustec / Scanner A3 A320	2014
2	Mesin Penghancur Kertas	Aurora / AS 1610SB	2014
3	Mesin Foto Copy Uk.Folio	Canon / IR2520, ADF Dual Casette	2014
4	Papan Visual	-	2014
5	Mesin Absensi	Innovation / Rf 588	2014
6	Alat Kantor Lainnya	-	2014
7	Lemari Es	Samsung / RT22	2014
8	Dispencer	Sharp / Bottom Load SWD68	2014
9	Dispencer	Sharp / Bottom Load SWD68	2014
10	Dispencer	Sharp / Bottom Load SWD68	2014
11	Komputer Unit /Jaringan Lainnya	Lenovo / AIO C440 246	2014
12	Komputer Unit /Jaringan Lainnya	Lenovo / AIO C440 246	2014
13	Komputer Unit /Jaringan Lainnya	Lenovo / AIO C440 246	2014
14	Komputer Unit /Jaringan Lainnya	Lenovo	2014
15	Lap Top	Apple / Mackbook Air i5	2014
16	Printer	Epson / L355 Deskjet Infus	2014
17	Printer	HP / Laserjet Pro M401dn	2014
18	Peralatan Personal Komp. Lainnya	ICA	2014
19	Modem	GSM / USB	2014
20	Mesin Foto Copy Uk.Folio	Canon / IR 2530 + ADF	2015
21	Mesin Foto Copy Uk.Folio	RISO / EZ 331A	2015
22	Alat Kantor Lainnya	Brankas Yunika YS 160 D	2015
23	Alat Kantor Lainnya	-	2015
24	Kursi Besi / Metal	Chitose Caesar N	2015
25	Meubelair Lainnya	Meja Kerja / 1 Biro	2015
26	Alat Dapur Lainnya	Kulkas Samsung / RSA-1VTSL, Digital Inverter Technology	2015
27	Dispencer	Sharp / SWD EBEH BK	2015
28	P.C. Unit	Apple / Imac 2,7 GHz-C-i5/8GB/1TB- Intel Iris Pro	2015
29	Lap Top	Apple / Macbook Pro/13,3/2,5 DC- i5/4GB/500	2015
30	Printer	Epson / L 1800	2015
31	Printer	HP / Laser Jet Pro 1102	2015
32	Printer	HP / Office Jet 100/Portable	2015
33	Kursi Tamu Diruangan Tunggu Pe	Kursi Bandara Cahaya	2015
34	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	-	2015
35	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	-	2015
36	Telephone Mobile	Samsung / Galaxy Note 3 Neo	2015
37	Telephone Mobile	Apple / iPad Air	2015
38	Alat Kantor Lainnya	ULP / Trimec Access Control System	2016
39	Rak Kayu	ULP	2016
40	Rak Kayu	ULP / Rak BUKU	2016
41	Meja Rapat	ULP / OVAL	2016
42	Kursi Tamu	ULP	2016
43	Kursi Biasa		2016
44	Meja 1/2 Biro	-	2016
45	Ac Sentral	ULP / AC Cassete 1 1/2 PK	2016
46	Ac Sentral	5 PK	2016
47	Amplifier	ULP / Amply-microphone	2016
48	Camera Video	ULP	2016
49	Alat Hiasan	ULP / ornamen Jembatan	2016
50	Alat Hiasan	ULP / ornamen Patung	2016
51	Hiasan Dinding	ULP / Lukisan	2016
52	Hiasan Dinding	ULP / Lukisan	2016
53	P.C. Unit	PC ULP	2016
54	Personal Komputer Lainnya	Cloud Backup	2016
55	Hardisk	HDD Server	2016
56	Printer	ULP epson I 220 / 8562/SP2D- LS/1.20.3.1/2016	2016
57	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis		2016
58	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis		2016
59	Power Supply	UPS 600VA	2016
60	Container	BOX CONTAINER	2017
61	Mesin Penghancur Kertas	-	2017
62	Meja Rapat	-	2017
63	Kursi Rapat	KURSI RAPAT DAN KURSI STAF	2017
64	Dispencer		2017
65	Lap Top	MacBook DAN OFFICE HOME	2017
66	Personal Komputer Lainnya		2017
67	Personal Komputer Lainnya		2017
68	Printer	PRINTER	2017
69	Meja Kerja Pejabat Eselon III		2017
70	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		2017
71	Meja Kerja Pejabat		2017
72	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		2017

73	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		2017
74	Kursi Kerja Pejabat		2017
75	Meja Kerja		2017
76	Station Wagon	Honda/HRV / HRV 1500 S MT Spesial Color	2018
77	Mesin Foto Copy D/Folio	Bishub 165	2018
78	Filling Besi/Metal	Filling Cabinet Besi	2018
79	Sofa	-	2018
80	Televisi	Samsung / LED-UA43K5002 SAMSUNG	2018
81	P.C. Unit	Lenovo / AIO intel i7, RAM : 4GB,HHD: 1 TB,Touch Screen Wi	2018
82	Cpu	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2018
83	Printer	Epson L565	2018
84	Software	Uninterrupted Power Supply (UPS)	2018
85	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Lemari Besi/Metal	2018
86	Unintemuptible P.S.(Ups)	Uninterrupted Power Supply (UPS)	2018
87	LCD Projector/Infocus	Proyektor Benq / Mp515 series	2019
88	P.C. Unit	LENOVO All-in-One / idea Centre AIO520 22IKL	2019
89	Lap Top	Apple Mac Book Air (13 inci) / MacBookAir 7,2 (Silver)	2019
90	Printer	Printer Epson / L3110	2019
91	Printer	Printer Epson / L565	2019
92	Printer	Printer Epson / L565	2019
93	Printer	Printer Epson / L3110	2019
94	KOMPUTER SERVER	1 unit spesifikasi Thinksystem SR550, uel intel xeon silver 4210 10c 2. ghz 85W,0GB, rai 530-81pcle 12 GB aapter 1 x 750 W,XCC stanar.	2020
95	UPS	1 unit spesifikasi Thinksystem SR550, uel intel xeon silver 4210 10c 2. ghz 85W,0GB, rai 530-81pcle 12 GB aapter 1 x 750 W,XCC stanar.	2020
96	AC	AC 1 PK Sharp 2 unit, AC 1 PK Panasonic 4 unit	2020
97	LAPTOP	2 unit merkbook air 13 inch	2020
98	LEMARI ARSIP	Lemari Arsip Besi 15 buah (spesifikasi : Optima swing securiline '880x480x1825 mm)	2020
99	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	1 Unit Pajero Sport 2,5L GLX-H (4x4) 5 M/T White colour-VIN 2019, 73161600-KDR-004776920 MITSUBISHI	2020
100	MEUBELER	1 unit meja rapat merk quarovt 2412, 12 buah meja 1/2 bro LX 1280 CC, 1 buah meja tamu CB 251-02 piano celini, 1 buah coffetable amsteram, 1 buah kursi irut NEP 971 A	2020
101	GORDEN KANTOR	1 set gorden kantor	2020
102	ALAT PEREKAM	1 unit camer DSLR dengan Recording Movie, 2 unit memori card	2020
103	mesin penghancur kertas 3 unit	3 unit	2021
104	Laptop	4 unit	2021
105	Mesin Foto Copy	1 Unit	2021
106	Komputer PC AI in One	15 Unit	2021
107	Mesin Scanner	2 unit	2021
108	Kendaraan Dinas	2 unit merk Rush	2021
109	Ac Split	10 unit	2021
110	Ac Standing 5 PK	4 Unit	2021
111	Sound sisten	1 Paket	2022
112	Komputer All In One	1 Unit	2022
113	Laptob	1 Unit	2022
113	Brankas	1 Unit	2022
114	UPS	12 Unit	2022
115	Mesin Foto Copy	1 Uni	2022

### C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Agar muatan dokumen Laporan Kinerja ini lebih menjelaskan kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua, maka sistematika penyajian disajikan sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

**Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini disajikan realisasi anggaran yang dicapai pada tahun yang bersangkutan untuk setiap program/kegiatan/sub kegiatan.

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **Lampiran :**

- 1) IKU SKPD Periode 2019-2023
- 2) Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II Tahun 2023
- 3) Jenis Penghargaan yang diterima Tahun 2023

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dengan menggunakan indikator kinerja dan target sebagai ukuran dalam mencapai sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2018-2023 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kebijakan serta dirumuskan dalam rencana kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua tahun 2023.

Sebagai tindak lanjut dari perencanaan kinerja, pada tanggal 30 Maret tahun 2023 telah ditandatangani penetapan kinerja oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua. Penetapan kinerja ini merupakan suatu bentuk tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima tanggungjawab dengan pihak yang memberi tanggungjawab. Sehingga dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsung.

Penetapan kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua tersebut merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan yang didukung oleh seluruh jajaran di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua untuk menjalankan amanah yang telah di berikan Gubernur selaku Kepala Daerah sebagai atasan langsung dalam rangka mewujudkan suatu target kinerja.

Penetapan kinerja setiap tahun ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja organisasi pada hakekatnya merupakan wujud

kesungguhan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Tentang Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2019-2023 dalam rangka mendukung Pencapaian visi dan misi serta tujuan Kepala Daerah dan didukung secara bertahap oleh seluruh komponen dalam suatu organisasi di tingkat Biro Pengadaan Barang dan Jasa sesuai tugas dan fungsi.

### **1. Strategi dan Kebijakan Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua telah merumuskan tujuan pokok yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang berkualitas untuk menunjang kinerja Pemerintah Provinsi Papua.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua merupakan satuan kerja yang bertugas untuk merumuskan kebijakan, dan melaksanakan koordinasi, serta pembinaan dan pengawasan terhadap proses layanan pengadaan barang/jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Tugas tersebut harus dilaksanakan secara optimal untuk mendukung dan mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Papua Periode 2019 – 2023 yaitu, **PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN.**

Adapun misi Gubernur Provinsi Papua yaitu sebagai berikut :

1. Memantapkan Kualitas dan daya saing SDM
2. Memantapkan rasa aman, tentram, dan damai serta kehidupan demokrasi dalam memperkuat NKRI.

### **3. Penguatan tata kelola Pemerintahan.**

4. Penguatan dan percepatan perekonomian daerah sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural.

5. Percepatan pembangunan daerah tertinggal, terbelakang, terdepan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Papua, Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua memiliki keterkaitan dengan misi ke 3 yaitu "**Penguatan Tata Kelola Pemerintahan**".

Dalam misi ke 3 Gubernur Provinsi Papua tersebut, adapun sasaran kerja yang menjadi prioritas pembangunan yang hendak didukung oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua yaitu:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dengan membuat SOP Pelayanan pengadaan Barang/Jasa.
2. Meningkatkan koordinasi dengan OPD lainnya dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/ Jasa melalui LPSE.
3. Meningkatkan Kompetensi Sumber daya aparatur khususnya tenaga fungsional Pengadaan barang/jasa dalam upaya meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua serta misi ke-3 Pemerintah Provinsi Papua, maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan berdasarkan aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, terpadu, terarah, dan terkoordinasi.

## **2. Tujuan Strategis Organisasi**

Tujuan strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tahun 2019-2023 yaitu "*Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang berkualitas untuk menunjang kinerja Pemerintah*

*Provinsi Papua.”*

### 3. Sasaran Strategis Organisasi

Guna mencapai tujuan strategis maka telah ditetapkan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Biro PBJ SETDA Provinsi Papua selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai.

Sasaran strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa yang memenuhi kaidah Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Meningkatnya pemanfaatan layanan SPSE pengadaan secara elektronik;
3. Meningkatnya Profesional SDM pengelola PBJ
4. Meningkatnya Auntabilitas Kinerja Biro PBJ Prov.Papua

**Tabel 2.1.**

Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS
1	Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa yang memenuhi kaidah Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Persentase Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	$\frac{\text{Jumlah paket selesai tender/seleksi}}{\text{Jumlah dokumen yang diproses}} \times 100\%$
		Persentase efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilihan PBJ	$\frac{\text{Total Nilai HPS} - \text{Total Nilai Kontrak}}{\text{Total Nilai Kontrak (HPS)}} \times 100\%$
2	Meningkatnya pemanfaatan layanan SPSE pengadaan secara elektronik	Persentase Penggunaan SPSE dan Aplikasi lokal PBJ	a. $\frac{\text{Jumlah SKPD yang mengumumkan (RUP)}}{\text{Jumlah total SKPD}} \times 100\%$ b. Jumlah Pelaku Usaha Papua yang terdaftar dalam aplikasi SIKAP OAP (perusahaan) Tahun
3.	Meningkatnya Profesional SDM pengelola PBJ	Persentase keterisian Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	$\frac{\text{Jumlah ASN yang lulus ujian jabatan fungsional PBJ}}{\text{Jmlh formasi jabatan fungsional}} \times 100\%$
		Tmempertahan Tingkat Kematangan UKPBJ	Level
		Persentase Sanggahan/ pengaduan yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sanggah yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Sanggah}} \times 100\%$
4	Meningkatnya Auntabilitas Kinerja Biro PBJ Prov.Papua	Hasil SAKIP Biro PBJ Setda Prov.Papua	Nilai SAKIP hasil Penilaian APIP

**B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja (PK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2023 sejak diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.2.**  
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa yang memenuhi kaidah Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Persentase Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	100
		Persentase efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilihan PBJ	Persen	6
2	Meningkatnya pemanfaatan layanan SPSE pengadaan secara elektronik	Persentase Penggunaan SPSE dan Aplikasi lokal PBJ	Persen	100
3.	Meningkatnya Profesional SDM pengelola PBJ	Persentase keterisian Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	Persen	60
		Mempertahan Tingkat capaian Kematangan UKPBJ	Level	3
		Persentase Sanggahan/ pengadaan yang terselesaikan	Persen	100
4	Meningkatnya Auntabilitas Kinerja Biro PBJ Prov.Papua	Hasil SAKIP Biro PBJ Setda Prov.Papua	Nilai SAKIP	BB

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terdiri dari 4 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja dengan penjelasan dan rumus pengukuran indikator sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa yang memenuhi kaidah Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

a. Indikator Kinerja 1 : Persentase Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Untuk indikator kinerja ini di rumuskan :

$$\frac{\text{Jumlah paket selesai tender/seleksi}}{\text{Jumlah dokumen yang diproses}} \times 100\%$$

b. Indikator Kinerja 2 : Persentase efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilihan PBJ.

Untuk indikator kinerja ini di rumuskan :

$$\frac{\text{Total Nilai HPS} - \text{Total Nilai Kontrak}}{\text{Total Nilai Kontrak (HPS)}} \times 100\%$$

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pemanfaatan layanan SPSE pengadaan secara eletronik.

Untuk indikator kinerja ini yaitu Persentase Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Aplikasi lokal PBJ yang di rumuskan :

a. Indikator Kinerja 1 :

$$\frac{\text{Jumlah SKPD yang mengumumkan (RUP)}}{\text{Jumlah total SKPD}} \times 100\%$$

b. Indikator Kinerja 2

Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Papua yang terdaftar dalam aplikasi SIKAP OAP Tahun n- Tahun (n-1)

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Profesional SDM pengelola PBJ.

Untuk indikator kinerja ini di rumuskan :

a. Indikator Kinerja 1 : Persentase keterisian Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

$$\frac{\text{Jumlah ASN jabatan fungsional PBJ tahun } n}{\text{Jumlah formasi jabatan fungsional}} \times 100\%$$

b. Indikator Kinerja 2 : Persentase Sanggahan/pengaduan yang terselesaikan  
 Persentase Sanggahan/pengaduan yang terselesaikan

$$\frac{\text{Jumlah Sanggahan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah paket tender/seleksi yang disanggah}} \times 100\%$$

**C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023**

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2023 telah ditetapkanlah DPA APBD Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua tahun 2023, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

**Tabel 2.3.**

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>7.115.057.350,00</b>
	a. Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1.124.657.350,00
	b. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.109.000.000,00
	c. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	350.000.000,00
	d. Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	890.400.000,00
	e. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	455.000.000,00
	f. Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	186.000.000,00
	g. Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000.000,00
	h. Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	350.000.000,00
	i. Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	350.000.000,00
2.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>14.488.049.300,00</b>

a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000,00
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	69.000.000,00
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000,00
d.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.640.049.300,00
e.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60.000.000,00
f.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	30.000.000,00
g.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00
h.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000,00
i.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00
j.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00
k.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	520.000.000,00
l.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.000.000,00
m.	Penyediaan Bahan/Material	1.072.000.000,00
n.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.344.000.000,00
o.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.809.000.000,00
p.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	594.000.000,00
q.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	321.000.000,00
r.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000,00
s.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.004.000.000,00
t.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	499.000.000,00
u.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>21.603.106.650,00</b>

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam kurun waktu Tahun 2023

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka perwujudan visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan pengukuran yang dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan yang dapat berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, dampak dan manfaat.

Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing

indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa khususnya untuk Tahun 2023.

Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua merupakan kinerja tahun ke-5 pada periode Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua 2019-2023.

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar **126,70%** yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3.1.**

Hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Sasaran Strategis 1.</b>				
Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa yang memenuhi kaidah Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)				
1.	Persentase Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	100 %	96,90%	96,90%
2.	Persentase efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilihan PBJ	6 %	17,86 %	297,67%
<b>Sasaran Strategis 2.</b>				
Meningkatnya pemanfaatan layanan SPSE pengadaan secara eletronik				
1	Meningkatnya pemanfaatan layanan SPSE pengadaan secara eletronik	100 %	100%	100%
<b>Sasaran Strategis 3.</b>				
Meningkatnya Profesional SDM pengelola PBJ				
1	Persentase keterisian Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	60%	60%	100%
2	Mempertahan Tingkat capaian Kematangan UKPBJ	Proaktif	Proaktif	100%
3	Persentase Sanggahan/ pengaduan yang terselesaikan	100%	92,31%	92,31%
<b>Sasaran Strategis 4.</b>				
Meningkatnya Auntabilitas Kinerja Biro PBJ Prov.Papua				
1	Hasil SAKIP Biro PBJ Setda Prov.Papua	BB	BB*	100%

**Keterangan :** \* Menggunakan Realisasi Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 target;

- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 target;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 6 target:  
dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 target.

Selain itu, indikator kinerja nilai SAKIP Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua menggunakan realisasi tahun 2022, karena hasil pengukuran realisasi penilaian SAKIP tahun 2023 akan dinilai di tahun 2024.

## **B. Analisis Capaian Kinerja**

### **Sasaran Strategis 1.**

#### **Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Memenuhi Kaidah Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ)**

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa yang memenuhi kaidah Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)” sebagai berikut

**Tabel 3.2.**

Capaian indikator

Sasaran Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa yang memenuhi kaidah Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1.1 Persentase Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	100 %	96,90%	96,90%
1.2. Persentase efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilihan PBJ	6 %	17,86 %	297,67%

Prinsip Pengadaan sesuai ketentuan Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah

dengan Perpres 12/2021 yang meliputi :

1. Prinsip pertama ialah efisien. Hal ini dapat diukur terhadap seberapa besar upaya termasuk di dalamnya dana dan daya yang dikerjakan demi terpenuhinya barang/jasa dengan spesifikasi tertentu. Semakin kecil upaya yang dikerjakan, sebuah proses pengadaan akan dapat dikatakan semakin efisien.
2. Prinsip kedua ialah efektif. Hal ini dapat diukur dari seberapa jauh barang/jasa yang diperoleh dari pengadaan yang dilakukan dapat memenuhi spesifikasi yang diharapkan.
3. Prinsip ketiga adalah transparan, yang memastikan proses pengadaan suatu barang/jasa dapat diketahui secara luas. Proses ini meliputi dasar hukum, tata cara, spesifikasi barang/jasa, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan itu sendiri.
4. Prinsip keempat ialah terbuka, yang menjadikan pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa dengan kriteria yang sudah terpenuhi dan mendukungnya dengan memberikan akses terhadap informasi tentang prosedur yang ditetapkan.
5. Prinsip kelima adalah bersaing, yang menjadikan proses pengadaan barang/jasa menciptakan iklim persaingan sehat di antara penyedia barang/jasa tanpa adanya intervensi yang dapat mengganggu mekanisme dalam pasar.
6. Prinsip keenam adalah adil, yang menjamin proses pengadaan barang/jasa memberikan perlakuan sama bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang tertarik tanpa ada perlakuan khusus bagi salah satunya.
7. Prinsip terakhir ialah akuntabel, yang memastikan proses pengadaan barang/jasa dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

**1.1. Persentase Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.**

Efektifitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa diukur dengan membandingkan antara paket tender/seleksi yang di proses dengan tender/seleksi selesai. Hasil capaian indikator atas efektifitas pengadaan barang/jasa tahun 2023 sebesar 96,90%. Hasil capaian indikator kinerja 96,90% dikarenakan dari total dokumen tender/seleksi yang diproses dalam pelaksanaan pemilihan penyedia sebanyak 97 paket terealisasi sebanyak 94 paket. Paket tidak selesai sebanyak 3 paket disebabkan karena gagal/batal tender dan tidak didapat dilakukan tender ulang, atau tender gagal dilakukan proses pemilihan dengan metode penunjukan langsung atau dengan metode e-purchasing. Realisasi jumlah paket tender/seleksi proses dan selesai serta gagal/batal sebagai berikut :

**Tabel 3.3.**

Realisasi Pelaksanaan Tender/Seleksi 2023

No	Kategori	Jumlah Paket Tender	Jumlah Paket Selesai	Jumlah Paket Gagal/Batal Gagal/Batal
1	Konstruksi	53	51	2
2	Jasa Konsultansi Konstruksi	37	37	0
3	Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2	2	0
4	Pengadaan Barang	3	2	1
5	Jasa Lainnya	2	2	0
<b>JUMLAH</b>		<b>97</b>	<b>94</b>	<b>3</b>

*Keterangan : Sumber Data Bagian PPBJ dan Aplikasi SPSE*

**Tabel 3.4.**

Realisasi Tender/Seleksi Gagal/Batal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Tahun 2023

No	Nama Paket	Alasan Gagal/Batal
1.	Pembangunan Jembatan Nawa (50M) (Ruas Nimbotong - Lereh - Tengon)	Sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi, maka Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal. Dikarenakan waktu pelaksanaan untuk pekerjaan ini adalah 75 hari kalender maka akan melewati tahun anggaran jika dilakukan proses tender ulang. Oleh sebab itu sebagai tindak lanjut dari tender gagal untuk pekerjaan ini adalah penghentian proses tender

2.	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	CV. PETNOR JAYA PAPUA - 43.733.412.1-952.000175.600.000,00 Rp. 2.175.600.000,00 1. Spesifikasi teknis yang disampaikan bukan milik penyedia, tetapi Spesifikasi Teknis dari SKPD 2. Tidak menyampaikan Surat Dukungan dari Pengrajin Emas/Toko Perhiasan Emas
3.	Pembangunan PLTS 30 kWp di Kampung Ormu Distrik Rafinirara Kabupaten Jayapura	3 penyedia tidak lulus evaluasi dan memperhatikan waktu pelaksanaan tender dan pekerjaan tidak dapat dilakukan tender ulang

**Keterangan :** Sumber Data Bagian PPBJ/ Aplikasi SPSE/Pokja Pemilihan

Kendala yang dihadapi terhadap efektifitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada proses tender/seleksi disebabkan karena :

1. Keterlambatan dokumen dari SKPD yang dimasukan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua.
2. Keterlambatan PPK mengembalikan perbaikan dokumen perencanaan pengadaan hasil kaji ulang oleh Pokja Pemilihan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua.
3. Ketidak sesuai penyusun jadwal RUP oleh PA dengan realita dokumen paket pekerjaan yang ditenderkan.
4. Terdapat paket pekerjaan pada APBD induk yang ditenderkan pada bulan Oktober serta masih terdapat paket pekerjaan fisik APBD Perubahan.
5. Minimnya SDM PA/PPK dan PPTK prinsip dan etika pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Perbandingan indikator Persentase Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5.**

Perbandingan indikator Persentase Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2020-2023

Realisasi Capaian (Tahun/%)			
2020	2021	2022	2023
93,00%	97,11%	99,12%	96,90%

**Keterangan :** Sumber Data Laporan Kinerja Tahunan

**Tabel 3.6.**

Perbandingan Realisasi Pelaksanaan Tender/Seleksi  
Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Tender/Seleksi (Paket)	Jumlah tender selesai (Paket)	Capaian (%)	Tender Gagal (Paket)
2020	357	332	92,99	25
2021	104	101	97,11	3
2022	228	226	99,12	2
2023	97	94	96,90	3

*Keterangan : Sumber Data Laporan Kinerja Tahunan*

## 1.2. Persentase Efisiensi Anggaran Dalam Pelaksanaan Pemilihan PBJ.

Prinsip pengadaan barang dan jasa salah satunya adalah efisien. Hal ini dapat diukur terhadap seberapa besar upaya termasuk di dalamnya dana dan daya yang dikerjakan demi terpenuhinya barang/jasa dengan spesifikasi tertentu. Semakin kecil upaya yang dikerjakan, sebuah proses pengadaan akan dapat dikatakan semakin efisien. Efisiensi pengadaan dilakukan sejak tahapan penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan pengadaan dan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui negosiasi harga. Capaian Persentase Efisiensi Anggaran Dalam Pelaksanaan Pemilihan PBJ Tahun 2023 mencapai 297,67% lebih tinggi dari target efisiensi anggaran yang ditetapkan sebesar 6% terealisasi sebesar 17,86% ini artinya bahwa pokja telah melakukan proses pemilihan penyedia melalui pemilihan penyedia dengan harga terendah dan melakukan negosiasi harga terhadap calon penyedia serta telah melakukan analisis harga satuan. Realisasi efisiensi anggaran hasil tender pengadaan tahun 2023 sebesar Rp. 116.683.030.692,- yang diperoleh dari selisih antara nilai HPS sebesar Rp. 653.308.422.640,- terhadap nilai negosiasi sebesar 537.257.417.304,- untuk paket yang selesai ditenderkan.

Hasil capaian realisasi efisiensi anggaran belanja

pengadaan menurut kategori pengadaan melalui proses tender sebagai berikut :

**Tabel 3.7.**  
Capaian Realisasi Efisiensi Anggaran Belanja Pengadaan Menurut Kategori Pengadaan Tahun 2023

No	Kategori	REALISASI EFISIENSI PENGADAAN			
		Nilai Total HPS	Negosiasi	Penghematan (HN-HPS)	Persen
1	KONSTRUKSI	628.684.080.622	514.198.843.019	114.485.237.603	18,21%
2	JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI	16.051.674.809	14.238.858.704	1.812.816.105	11,29%
3	JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI	1.207.742.826	1.193.094.600	14.648.226	1,21%
4	PENGADAAN BARANG	5.068.924.383	4.874.404.125	194.520.258	3,84%
5	JASA LAINNYA	.296.000.000	120.191.500	175.808.500	7,66%
<b>JUMLAH</b>		<b>653.308.422.640</b>	<b>537.257.417.304</b>	<b>116.683.030.692</b>	<b>17,86%</b>

*Keterangan : Sumber Data diolah dari aplikasi LPSE.Papua.go.id*

Efisiensi anggaran pengadaan pada pelaksanaan pemilihan penyedia berdasarkan kategori pengadaan dari yang terbesar sampai yang terendah yaitu paket konstruksi sebesar 18,2%, paket jasa konsultasi konstruksi 11,3%, paket jasa lainnya 7,7%, paket pengadaan barang 3,8% dan paket jasa konsultasi non konstruksi 1,2%.

Perbandingan indikator efisiensi anggaran dalam pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa Tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.8.**  
Perbandingan Indikator Efisiensi Anggaran Dalam Pelaksanaan Tender Tahun 2020-2023

Uraian	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Total HPS	2.117.698.528.303	1.772.455.658.798	1.740.096.069.970	653.308.422.640
Penghematan	134.423.064.147	53.837.187.702	146.716.383.090	116.683.030.692
Realisasi %	6,35	3,04	8,43	17,86
Target	6	6	6	6
<b>Capaian %</b>	<b>105,83</b>	<b>50,66</b>	<b>140,5</b>	<b>297,67%</b>

*Keterangan : Sumber Data Sub Bagian Monev*

**Sasaran Strategis 2.**

Meningkatnya Pemanfaatan Layanan SPSE Pengadaan Secara Elektronik

Capaian indikator sasaran strategis “Meningkatnya Pemanfaatan Layanan SPSE Pengadaan Secara Elektronik” adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.9.**

Capaian Indikator Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemanfaatan Layanan SPSE Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2.1 Persentase Penggunaan SPSE dan Aplikasi lokal PBJ	100 %	100%	100%

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung (Perpres 16/2018 pasal 69). Layanan pengadaan secara elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan fungsi meliputi :

- a. Pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
- b. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sitem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua dalam pelayanan tugas dan fungsi telah berinovasi dalam pengembangan aplikasi lokal dalam mendukung peneolaan pengadaan secara elektronik yang terintegrasi dengan SPSE Nasional yaitu aplikasi Sistem informasi pengadaan “Singa2.papua.go.id” dan aplikasi sistem kinerja penyedia orang asli Papua “sikap-oap.papua.go.id”

**2.1. Persentase Penggunaan SPSE dan Aplikasi lokal PBJ**

Dalam mendukung pencapaian penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) mengacu pada surat edaran kKepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang penjelasan ITKP minimal baik sebagai aspek indikator indek reformasi birokrasi yaitu melalui pemanfaatan sistem pengadaan yaitu seluruh pengguna anggaran wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP). Hasil capaian indikator Persentase Penggunaan SPSE dan Aplikasi lokal PBJ sebagai berikut :

**Tabel 3.10.**

Jumlah SKPD yang Mengumumkan RUP Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
a Jumlah SKPD Yang Mengumumkan RUP (SKPD)	36	36	100%

**Keterangan :** Sumber Data Aplikasi Singa.Papua.go.id/Sirup.LKPP.go.id

Hasil capaian realisasi jumlah SKPD yang mengumumkan RUP sebesar 100% dimana dari 35 SKPD Pemerintah Provinsi Papua terealisasi mengumumkan sebesar 35 SKPD. Keberhasilan SKPD mengumumkan RUP tepat waktu yaitu 31 Maret 2023 sejak di tetapkannya APBD TA. 2023.



← Daftar Rencana Umum Pengadaan ⓘ

Jumlah Paket <b>7,950</b>	Nilai Pagu RUP <b>Rp 5,386,337,557,323</b>
------------------------------	---

Provinsi ▾ Semua Kategori ▾ PROVINSI PAPUA ▾ Semua Eselon ▾

← Daftar Rencana Umum Pengadaan ⓘ

Jumlah Paket <b>4,216</b>	Nilai Pagu RUP <b>Rp 1,483,043,938,138</b>
------------------------------	---

Provinsi ▾ Penyedia ▾ PROVINSI PAPUA ▾ Semua Eselon ▾

← Daftar Rencana Umum Pengadaan ⓘ

Jumlah Paket <b>3,734</b>	Nilai Pagu RUP <b>Rp 3,903,293,619,185</b>
------------------------------	---

Provinsi ▾ Swakelola ▾ PROVINSI PAPUA ▾ Semua Eselon ▾

### Realisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2023

Keberhasilan diumumkannya RUP tepat waktu oleh 35 SKPD Pemerintah Provinsi Papua didukung dengan aplikasi lokal “singa2.papua.go.id” yaitu aplikasi perantara yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Aplikasi tersebut terintegrasi dengan aplikasi SIRUP Nasional dimana SKPD melakukan pemaketan pekerjaan melalui aplikasi lokal dan akan diintegrasikan ke Aplikasi SIRUP LKPP.

Keberhasilan ini juga didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua melalui Coaching Klinik penginputan RUP yang dilaksanakan pada

tanggal 28 Maret 2023.

Perbandingan RUP Pemerintah Provinsi Papua yang diumumkan oleh SKPD Tahun 2020-2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.11.**

Realisasi Penginputan RUP SKPD Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah SKPD	Jumlah SKPD Menginput RUP	Capaian (%)
2020	35	20	57,15
2021	35	31	88,57
2022	35	35	100,00
2023	35	35	100,00

*Keterangan : Data diolah dari <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap/>*

**Tabel 3.12.**

Rekapitulasi Perbandingan Data RUP Kategori Penyedia Tahun 2020- 2023

Metode	Realisasi Input RUP Kategori Penyedia			
	2020	2021	2022	2023
Pengadaan Langsung	3308	1931	3229	3.614
e-Purchasing	226	107	72	332
Seleksi	247	23	140	48
Penunjukan Langsung	223	156	64	43
Tender	218	107	166	67
Tender Cepat	21	7	0	0
Dikecualikan	0	0	23	112
<b>TOTAL</b>	<b>4.243</b>	<b>2.331</b>	<b>3.694</b>	<b>4.216</b>

*Keterangan : Data diolah dari <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap/>*

Salah satu indikator perhitungan capaian persentase penggunaan SPSE dan aplikasi lokal PBJ yaitu peningkatan jumlah Pelaku Usaha Papua yang terdaftar dalam aplikasi SIKAP OAP adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.13.**

Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Papua yang Terdaftar Dalam Aplikasi SIKAP OAP Tahun 2023

Indikator	Existing 2022	Tahun 2023	Capaian
b Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Papua yang terdaftar dalam aplikasi SIKAP OAP	1.923	2.503	30,16%

*Keterangan : Sumber Data "sikap-oap.papua.go.id"*

Sesuai ketentuan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 diwajibkan kepada setiap pelaku usaha terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia LKPP (SIKAP-LKPP) dan untuk pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) sesuai Perpres 17 Tahun 2019 dan Pergub Papua Nomor 46 Tahun 2021 diwajibkan terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia Orang Asli Papua (SIKAP-OAP). Sejak diberlakukannya DOB di Provinsi Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, maka data jumlah Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang terdaftar pada SIKAP-OAP sebagai berikut :

**Tabel 3.14**

Jumlah Pelaku Usaha OAP Per Kabupaten/Kota di Provinsi Papua  
Yang Terdaftar Dalam Aplikasi SIKAP OAP Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan
1	Kota Jayapura	916
2	Kabupaten Jayapura	192
3	Kabupaten Keerom	26
4	Kabupaten Sarmi	38
5	Kabupaten Biak Numfor	172
6	Kabupaten Supiori	79
7	Kabupaten Kepulauan Yapen	38
8	Kabupaten Waropen	5
9	Kabupaten Mamberamo Raya	13
	<b>Total Provinsi Papua</b>	<b>1.479</b>

*Keterangan : Sumber Data "sikap-oap.papua.go.id*

Keberhasilan pemanfaatan aplikasi lokal oleh pelaku usaha didukung dengan pelaksanaan Pelatihan Aplikasi SPSE bagi pelaku usaha Papua yang dilaksanakan tanggal 6-7 Juli 2023 di Hotel Horison Ultima Entrop Jayapura oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua melalui Bagian Pengelolaan LPSE.



**Gambar 3.1.**

Kegiatan Pelatihan Aplikasi SPSE Bagi Pelaku usaha OAP

**Sasaran Strategis 3.**

Meningkatnya Profesional SDM Pengelola PBJ

Capaian indikator sasaran strategis “Meningkatnya Profesional SDM Pengelola PBJ” adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.15.**

Capaian Indikator Sasaran Strategis

“Meningkatnya Profesional SDM Pengelola PBJ” Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.1	Persentase keterisian Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	60%	60%	100%
3.2	Mempertahankan Tingkat capaian Kematangan UKPBJ	Proaktif	Proaktif	100%
3.3	Persentase Sanggahan/ pengaduan yang terselesaikan	100%	92,30%	92,31%

**3.1. Persentase Keterisian Jabatan Fungsional Pengelola PBJ**

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi RI Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dimaksud dengan Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF-PPBJ) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan dan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah PNS yang diberi tugas , tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sesuai amanat Pasal 74A ayat (2) dan Pasal 74B ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Pemda wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang Jasa berupa Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan wajib menyusun rencana aksi Pemenuhan Pengelola PBJ. Sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2021 pada Pasal 5 ayat (2) terkait dengan Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ sekurang-kurangnya sudah harus mencapai minimal 60% pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) hingga 31 Desember 2023. Kebutuhan minimal 60% dari rekomendasi kebutuhan JF-PPBJ Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua yang ditetapkan LKPP setara dengan 35 JF-PPBJ.

Realisasi capaian Persentase Keterisian Jabatan Fungsional Pengelola PBJ sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.16.**

Jumlah Keterisian ASN JF-PPBJ Aktif Provinsi Papua  
Tahun 2023

No.	Jenjang Keterisian JF PPBJ Aktif	Rekomendasi LKPP	Keterisian JF-PPBJ Aktif		
			Target Kebutuhan Minimal 60%	Realisasi	Capaian
1	Pertama	28	17	10	58,82%
2	Muda	27	16	21	131,25%
3	Madya	4	2	4	200%
Total		59	35	35	100%

**Keterangan :** Sumber Data Bagian Pembinaan dan Advokasi

Berdasarkan data diatas nilai realisasi jumlah keterisian JF-

PPBJ Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2023 minimal 60% dari rekomendasi LKPP atau sebanyak 35 JF-PPBJ terealisasi sebanyak 35 JF-PPBJ atau nilai capaian 100%. Dibandingkan dengan total rekomendasi LKPP sebanyak 59 JF-PPBJ persentase keterisian JF-PPBJ baru mencapai 59,32%. Dengan adanya pemekaran DOB di Provinsi Papua berdampak pada jumlah anggaran dan jumlah paket pekerjaan pengadaan barang/jasa di Provinsi Papua sehingga jumlah 35 JF-PPBJ secara beban kerja sudah terpenuhi.

Perbandingan nilai realisasi capaian keterisian JF-PPBJ Tahun 2020-2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.17.**

Perbandingan Jumlah Keterisian ASN JF-PPBJ Aktif di Provinsi Papua Tahun 2020-2023

Tahun	Capaian Keterisian JFPPBJ Terhadap Rekomendasi LKPP Realisasi			Capaian Keterisian 60%		
	Rekomendasi LKPP	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2020	59	0	0	35	0	0
2021		20	33,90%		20	57,14
2022		34	57,63		34	97,14
2023		35	59,32		35	100

*Keterangan : Sumber Data Bagian Pembinaan dan Advokasi*

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan JF-PPBJ ada dari aspek jenjang dimana secara kuota rekomendasi LKPP jumlah jenjang Madya hanya di rekomendasi 4 JF-PPBJ. Kondisi ini menyebabkan menutup ruang bagi JF-PPBJ Muda untuk naik jenjang ke JF-PPBJ Madya. Untuk mengantisipasi kedepannya Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan langkah-langkah yaitu telah berkordinasi dan menyurati Kepala LKPP untuk merevisi jumlah kouta rekomendasi JF-PPBJ sehingga memberikan ruang untuk JF-PPBJ Muda untuk naik jenjang ke Madya.

Pencapaian target Persentase Keterisian Jabatan Fungsional Pengelola PBJ ditunjang dengan adanya pelaksanaan

Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Sub Kegiatan Pembinaan Sumberdaya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu melalui ujian kompetensi JF-PPBJ dan membentuk tim Penilai Angka Kredit JF-PPBJ.

### **3.2. Mempertahankan Tingkat Capaian Kematangan UKPBJ**

Sesuai Peraturan LKPP No. 5/2019 tentang Model Kematangan UKPBJ dijelaskan bahwa Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ terdiri atas 4 domain yaitu domain proses, domain kelembagaan, domain SDM, dan domain sistem informasi. Tingkat kematangan UKPBJ terdiri dari 5 tingkatan/level yaitu:

Level 1 : Inisiasi;

Level 2 : Esensi;

Level 3 : Proaktif;

Level 4 : Strategis; dan

Level 5 : Unggul

Target setiap UKPBJ adalah mencapai tingkat kematangan level 3 (Proaktif) untuk dapat disebut sebagai UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan pengadaan (*Procurement Center of Excellence*). Adapun realisasi Tingkat Capaian UKPBJ Pemerintah Provinsi Papua sebagai berikut :

**Tabel 3.18.**

Target dan Realisasi Tingkat Capaian Kematangan UKPBJ  
Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1	Mempertahan Tingkat capaian Kematangan UKPBJ	Proaktif	Proaktif	100%

**Keterangan :** <https://siukpbj.lkpp.go.id/monitoring-ukpbj>

Dari data diatas Pemerintah Provinsi Papua masih mempertahankan capaian indeks tingkat kematangan UKPJ pada level 3 Proaktif.

Nama Instansi	Pencapaian Level Kematangan	Manajemen Pengadaan	Manajemen Penyedia	Manajemen Kinerja	Manajemen Resiko	Pengorganisasian	Tugas & Fungsi	Perencanaan SDM Pengadaan	Pengembangan SDM Pengadaan	Sistem Informasi
PROVINSI PAPUA	9/9	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif
PROVINSI PAPUA BARAT	2/9	Esensi	Esensi	Esensi	Esensi	Proaktif	Proaktif	Esensi	Esensi	Esensi
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	0/9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVINSI PAPUA TENGAH	0/9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVINSI PAPUA SELATAN	0/9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	0/9	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data Level Kematangan UKPBJ

NO	Kategori Instansi	Level Kematangan						Total Instansi	Prosentase
		9/9	8/9	7/9	6/9	5/9	< 5/9		
Bobot Nilai RB PBJ		100	80	60	40	20	0		
1	Kementerian/Lembaga	19	27	2	2	3	31	84	0
2	Pemerintah Daerah	118	162	34	23	29	184	550	0
3	Instansi Lainnya	0	0	0	0	1	21	22	0
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Keterangan : sumber data <https://siukpbj.lkpp.go.id/monitoring-ukpbj>

Dari data diatas dapat dijelaskan bawah dari 550 Pemda sebanyak 118 Pemda telah memenuhi indeks kematangan proaktif termasuk didalamnya Pemerintah Provinsi Papua sedangkan 432 Pemda belum memenuhi target Indeks Kematangan UKPBJ. Hasil capaian indikator Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun 2023 sebagai berikut :



Pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan salah satu penilaian adalah capaian indeks tingkat kematangan UKPBJ dimana Pemerintah Provinsi Papua pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa Se-Tanah Papua di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya menerima penghargaan dari Kepala LKPP RI. Penghargaan berupa piagam tanda apresiasi sebagai berikut :



**Gambar 3.2.**  
Penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Papua  
Kepala LKPP

### **3.3. Persentase Sanggahan/ pengaduan yang terselesaikan.**

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 50 ayat 1 berbunyi : pelaksanaan pengadaan melalui tender/seleksi salah satunya yaitu sanggah. Ada tiga macam sanggah yaitu sanggah dipenetapan penyedia yang lulus kualifikasi, sanggah dalam penetapan pemenang tender, dan sanggah banding untuk semua pekerjaan konstruksi yang ditenderkan.

Sanggahan/pengaduan dapat terjadi dalam proses tender disebabkan karena :

- a. Kesalahan dalam melakukan evaluasi.
- b. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur

dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

- c. Rekeyasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- d. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.

Hasil capaian Sanggahan/pengaduan yang terselesaikan selama proses tender tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.19.**

Sanggah/Sanggah Banding/Pengaduan  
Terhadap Realisasi Tender Tahun 2023

Jumlah Tender (Paket)	Jumlah Peserta Sanggah	Jumlah sanggah Terhadap Jumlah progres Tender	Realisasi (paket)	Capaian
13	19	Tender Selesai	12	92,31%
		Sanggah diterima/Tender gagal	1	7,69%
		Jumlah	13	100,00%

**Keterangan :** Data bersumber dari Laporan Sub Bagian Advokasi

Berdasarkan data diatas, dalam Tahun 2023 Pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa sebanyak 13 paket tender yang disanggah, dengan total peserta yang melakukan sanggah sebanyak 19 peserta. Hasil dari 13 paket tender yang disanggah sebanyak 12 paket yang telah dijawab atau 92,31% dan proses tender berjalan sampai selesai dan telah ditetapkan pemenang tender, sedangkan 1 paket atau 7,69% pekerjaan yang disanggah oleh peserta tender yaitu **“CV. Mandiri Urak Jaya”** diterima oleh Pokja Pemilihan sehingga tender dinyatakan gagal. Paket pekerjaan tersebut adalah **“Pembangunan Jembatan Nawa (50M) (Ruas Nimbotong - Lereh - Tengon)”** dimana Pokja pemilihan menyatakan :

- Sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi, maka Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal.

- Dikarenakan waktu pelaksanaan untuk pekerjaan ini adalah 75 hari kalender maka akan melewati tahun anggaran jika dilakukan proses tender ulang.
- Oleh sebab itu sebagai tindak lanjut dari tender gagal untuk pekerjaan ini adalah penghentian proses tender.

Dari 12 paket tender yang disangah dan telah dijawab dan tender berproses sampai selesai yaitu terdiri dari pekerjaan sebagai berikut :

**Tabel 3.20.**

Sangah/Sangah Banding/Pengaduan  
Terhadap Realisasi Tender Tahun 2023

No	Paket Pekerjaan	Peserta	Keterangan
1.	Pembangunan Gedung Kantor UPPD/SAMSAT Biak	1. CV. Sarambu	Konstruksi
2.	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Serui - Kamanap – Ansus	1. CV. Asanka Teknik Konsultan 2. PT.Kencana Adya Daniswara	Jasa Konsultansi
3.	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Lereh - Pagai - Taria Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Lereh - Pagai – Taria	1. CV. Asanka Teknik Konsultan 2. PT.Kencana Adya Daniswara	Jasa Konsultansi
4.	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Warumbaim - Berap - Demta (DAK)	1. CV. Asanka Teknik Konsultan 2. PT.Kencana Adya Daniswara	Jasa Konsultansi
5.	Renovasi Ruang Sertifikasi Benih BPSB TPH (Tender Ulang)	CV. AY Konstruksi	Konstruksi
6.	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Masuk Doyo Lama	CV. Furiatama Consultant	Jasa Konsultansi
7.	Peningkatan Jalan Waren – Botawa	PT. Koteka Putra	Konstruksi
8.	Pembangunan Jalan Ambroben Sub - Ildi Sup - Afefbo - Sundeay - Kajasbo -Adibai	1. PT. Intisari Maju Bersama 2. PT. Immanuel 3. PT. Sonai Papua 4. PT. Pilar Delta Cakra	Konstruksi

9.	Pembangunan Jalan Ansus - Wooi/Natabui	PT. Koteka Putra	Konstruksi
10.	Pembangunan Jalan Arso XIV – Yanmas	PT. Yabal	Konstruksi
11.	Pembangunan Jaringan Air Bersih/SPAM di Kabupaten Keerom	CV. SkyLander	Konstruksi
12.	Pembangunan Jembatan Kali Ubiyong (25M) (Arso XIV - Sawia Kwarja (114)	CV. Berdikari Papua Perkasa	Konstruksi

**Keterangan :** Sumber data <https://siukpbj.lkpp.go.id/monitoring-ukpbj>

Realisasi capaian sanggahan yang terselesaikan pada pelaksanaan tender sebanyak 92,31% sangat dipengaruhi oleh kualitas Pokja Pemilihan dalam menyusun dokumen pemilihan, mengevaluasi dan mengambil keputusan dalam menentukan pemenang tender, sedangkan sebanyak 7,69% sanggahan menyebabkan proses tender gagal disebabkan karena kurang telitinya pokja dalam mengevaluasi dan menentukan calon pemenang.

Penyelesaian sanggah juga dipengaruhi dengan adanya kegiatan penampingan Advokasi PBJ dalam APBD TA. 2023 yaitu Sub Kegiatan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa dimana dengan dibentuknya tim penyelesaian hukum sanggah.

Perbandingan jumlah sanggahan/pengaduan pada pelaksanaan tender tahun 2020-2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.21.**

Perbandingan Jumlah Sanggahan/Pengaduan Pada Pelaksanaan Tender Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Paket Tender	Paket Sanggahan Terhadap Total Paket Tender	
		Jumlah	Persen
2020	388	59	15,21%
2021	112	16	14,28%
2022	226	20	8,85%
2023	97	13	13,40%
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>		<b>100,00%</b>

**Keterangan :** Data bersumber dari Laporan Sub Bagian

**Sasaran Strategis 4.**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Biro PBJ Prov.Papua

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Akuntailitas Kinerja Biro PBJ Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.22.**

Hasil SAKIP Biro PBJ Setda Prov.Papua Tahun 2023

	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
4.1.	Hasil SAKIP Biro PBJ Setda Prov.Papua	BB	BB*	100%

*Keterangan : \*Target dan Realisasi merupakan realisasi 2022*

**4.1. Hasil SAKIP Biro PBJ Setda Prov.Papua**

Target Nilai Implementasi SAKIP Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2023 adalah (A). Sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 akan dilakukannya pada tahun 2024 . Oleh karena itu, nilai realisasi implementasi SAKIP yang disajikan di atas merupakan data realisasi tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Papua. Berdasarkan penilaian evaluasi SAKIP tahun 2022, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua memperoleh nilai sebesar 79,62 kategori nilai “BB” dengan interpretasi “Sangat Baik” (Akuntabel, bekinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal).

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada tahun 2023. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Penyusunan perjanjian kinerja tepat waktu, mulai level II,III dan IV sampai dengan pegawai termasuk distribusi target kinerjanya secara proposional;
- b. Peningkatan kualitas SDM unit kerja yang mengelola

akuntabilitas kinerja;

- c. Pemanfaatan aplikasi TP2K dalam penyusunan rencana aksi, dan pelaporan realisasi target kinerja secara berkala; dan
- d. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran secara periodik (triwulanan).

Perbandingan realisasi Nilai Implementasi SAKIP Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua tahun 2020 s.d 2022 sebagai berikut :

**Tabel 3.23.**

Nilai SAKIP Tahun 2020- 2022

Tahun	Nilai SAKIP	Kategori	Interprestasi
2020	69,03	B	Baik
2021	72,26	BB	Sangat Baik
2022	79,62	BB	Sangat Baik

*Keterangan : Laporan Hasil Evaluasi atas LAKIP Pemerintah Provinsi Papua.*

Dari data diatas, maka ditahun 2023 untuk meningkatkan kualitas Implementasi SAKIP, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua telah melakukan beberapa hal antara lain:

- a. Melakukan reuiu Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua dan IKU unit kerja, terutama pada aspek metode/cara pengukuran setiap IKU;
- b. Menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja di periode berikutnya; dan
- c. Ikut serta pada pelatihan penyusunan laporan kinerja yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Papua.

### **C. Capaian Kinerja Lain**

#### **1. Capaian Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pada pasal 4 menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk huruf b “meningkatkan produk dalam negeri”, huruf c. “meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan koperasi” huruf d”meningkatkan peran pelaku usaha nasional”. Pasal 66 menjelaskan bahwa kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di tambah Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dimana menjelaskan bahwa penggunaan produk dalam negeri dimulai dari tahapan perencanaan, pengalokasian anggaran, dan realisasi belanja paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produk dalam negeri.

Hasil capaian Realisasi PDN terhadap perencanaan penyedia tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.24.**

Realisasi PDN Terhadap Perencanaan Penyedia Tahun 2023

Alokasi Perencanaan Penyedia Pada RUP		
Perencanaan Penyedia (Rp)	Perencanaan PDN (Rp)	Realisasi PDN Terhadap Perencanaan Penyedia (%)
1.483.043.938.138	1.245.386.951.614	83,98

Keterangan : Sumber data <https://lkpp.bigbox.co.id>

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Belanja APBD Pemerintah

Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.386.337.557.323,- dimana sebesar Rp. 1.483.043.038.138 adalah RUP dengan kategori belanja penyedia dan dari alokasi perencanaan belanja penyedia sebesar Rp. 1.245.386.951.614,- adalah perencanaan belanja PDN atau sebesar 84,01%.

Untuk realisasi pelaksanaan PDN Pemerintah Provinsi Papua hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.25.**

Realisasi Pelaksanaan PDN Tahun 2023

<b>Total Pelaksanaan Penyedia (Rp)</b>	<b>Total Pelaksanaan PDN (Rp)</b>	<b>Realisasi Pelaksanaan PDN (%)</b>
756.464.331.242	635.529.364.359	84,01

*Keterangan : Sumber data <https://lkpp.bigbox.co.id>*

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa total hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia Tahun 2023 yang dilakukan secara elektronik sebesar Rp. 756.464.331.242,- dan sebesar Rp. 635.529.364.359,- atau 84,01% adalah pelaksanaan PDN. Sedangkan untuk realisasi belanja PDN terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Papua sebagai berikut :

**Tabel 3.26.**

Realisasi Pelaksanaan PDN Tahun 2023

<b>Total Perencanaan PDN (Rp)</b>	<b>Total Pelaksanaan PDN (Rp)</b>	<b>Realisasi PDN Terhadap Komitmen (%)</b>
1.245.386.951.614	635.529.364.359	51,03

*Keterangan : Sumber data <https://lkpp.bigbox.co.id>*

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa Komiten Pemerintah Provinsi Papua dalam pembelanjaan PDN yang dilakukan oleh SKPD terealisasi sebesar sebesar 51,03%.

Capaian belanja PDN dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Papua dapat terealisasi dipengaruhi oleh beberapa rencana aksi yang dilakukan yaitu :

- a. Pelaksanaan Coaching Klinik bagi SKPD tentang percepatan penginputan RUP dan Komitmen rencana belanja Produk Dalam Negeri yang dilaksanakan tanggal 28-29 Maret 2023
- b. Rapat antara Pemerintah Provinsi Papua bersama Kepala LKPP-RI pada tanggal 4 Mei 2023 dimana fokus diskusi tersebut terkait : transparansi pengadaan barang/jasa, meningkatkan porsi UMKM, Meningkatkan porsi UMKM dan percepatan belanja pemerintah;
- c. Rapat Tim P3DN Provinsi Papua yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2023;
- d. Pelaksanaan monitoring baik melalui System dan monev lapangan;
- e. Pelaksanan pengawasan oleh APIP Inspektorat Provinsi Papua; dan
- f. Pemenuhan eviden MCP KPK pada area Pengadaan Barang/Jasa

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan komitmen PDN yaitu :

- a. Masih terdapat SKPD yang tidak melakukan tagging PDN dan UMK pada saat menginput RUP SKPD;
- b. Proses pengadaan barang/jasa masih dilakukan secara manual oleh SKPD dan tidak dilakukan pencatatan transaksi secara elektronik sehingga tidak dapat dipantau pelaksanaan P3DN.
- c. Sistem Penatausahaan Keuangan masih menggunakan aplikasi Simda yang tidak terintegrasi dengan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (AMEL) LKPP.

Dari permasalahan diatas maka solusi yang akan dilaksanakan ditahun mendatang yaitu :

- a. Memastikan seluruh SKPD melakukan input P3DN pada aplikasi SIRUP-LKPP;
- b. Kepala SKPD melakukan pernyataan komitmen atas target

- penggunaan PDN;
- c. Proses pengadaan barang/jasa pengadaan langsung dilakukan secara elektronik;
- d. Memastikan pembelanjaan e-purchasing melalui e-katalog.
- e. Melakukan monitoring secara berkala;
- f. Melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap PA/PPK dan PPTK.

## **2. Capaian Katalog Elektronik (e-Katalog) dan Bela Pengadaan**

Katalog Elektronik merupakan salah satu Sistem Informasi dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dibangun dan dikembangkan oleh LKPP dengan tujuan untuk mewujudkan proses pengadaan yang Cepat, Mudah, Transparan dan Tercatat Secara Elektronik. Selain itu, saat ini Katalog Elektronik juga menjadi mesin penggerak yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Penyedia UKM dan Koperasi serta mendorong pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengelolaan Katalog Elektronik (Lokal, Sektoral dan Nasional) oleh Pemerintah Provinsi Papua sesuai dengan Keputusan Kepala LKPP mengamanatkan setiap Provinsi Kabupaten/Kota dapat mengelola Katalog Elektronik.

Pengelola Katalog Elektronik adalah pihak yang mengelola dan menyelenggarakan layanan Katalog Elektronik berdasarkan Etalase Produk yang tercantum pada Katalog Elektronik. Pengelola Katalog Elektronik Nasional adalah LKPP. Pengelola Katalog Elektronik Sektoral adalah Kementerian atau Lembaga Sektor terkait, Pengelola Katalog Elektronik Lokal adalah Pemerintah Daerah terkait.

Hasil capaian komitmen pelaksanaan E-Purchasing Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.27.

Capaian Komitmen Pelaksanaan E-Purchasing Tahun 2023

Total E-Purchasing Perencanaan (Rp)	Total E-Purchasing Pelaksanaan (Rp)	Capaian Komitmen E-Purchasing (%)
181.988.359.425	136.078.866.921	74,77

Keterangan : Sumber data diolah dari <https://lkpp.bigbox.co.id>

Dari data diatas bahwa total perencanaan anggaran pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2023 melalui e-purchasing sebesar Rp. 181.988.359.425,- dan realisasi pelaksanaan sebesar Rp. 136.078.866.921,- atau capaian komitmen sebesar 74,77%.

Capaian komitmen tersebut didukung dengan adanya belanja pengadaan barang/jasa oleh SKPD yaitu belanja melalui e-Katalog Lokal, e-Katalog Sektoral dan e-Katalog Nasional dengan realisasi nominal belanja per SKPD sebagai berikut :

Tabel 3.28.

Realisasi Nominal Transaksi E-Katalog Per SKPD Tahun 2023

No.	Nama Instansi	Nominal Transaksi ePurchasing				
		2022	2023	Lokal	Sektoral	Nasional
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA	4.860.987.502	15.615.336.665		13.275.336.665	2.340.000.000
	RSUD Abepura BLUD	8.683.016.040				
2	DINAS PERHUBUNGAN		4.707.475.200		4.707.475.200	
3	DINAS KESEHATAN	11.999.581.281	5.912.793.810		4.903.580.770	1.009.213.040
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		4.742.649.100	4.742.649.100		
5	BIRO UMUM DAN PROTOKOL	23.789.241.599	4.245.803.500	2.708.803.500		1.537.000.000
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	3.070.300.000	4.009.551.800	2.679.551.800		1.330.000.000
7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA	32.985.844.198	82.396.624.012		82.396.624.012	
	RSUD Jayapura BLUD	25.913.023.554				
8	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA	645.571.340	2.021.400.000			2.021.400.000
9	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.580.310.220	1.923.460.500			1.923.460.500
10	INSPEKTORAT		1.448.749.000	495.949.000		952.800.000
11	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	487.800.000	803.399.800	803.399.800		
12	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		752.552.075			752.552.075
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.726.038.442	2.657.083.000	107.100.000		2.549.983.000
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ORANG ASLI PAPUA		683.240.000	683.240.000		
15	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		476.325.280	18.405.500	228.125.000	229.794.780
16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	359.896.170	651.561.630	308.052.000		343.509.630
17	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		241.026.400	241.026.400		
18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		227.500.000	227.500.000		
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		130.500.000	130.500.000		
20	BIRO LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	421.651.750	431.422.350	431.422.350		
21	KPHL UNIT XX BIAK		20.512.800	20.512.800		
22	BADAN SUMBERDAYA MANUSIA		1.491.600.000			1.491.600.000
23	BIRO HUKUM		467.000.000			467.000.000
24	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	2.391.200.000				
25	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.159.600.000				
24	BADAN PENGHUBUNG	3.177.700.000				
		<b>128.251.762.096</b>	<b>136.057.566.922</b>	<b>13.598.112.250</b>	<b>105.511.141.647</b>	<b>16.948.313.025</b>

Tahun 2023 sebesar Rp. 136.057.566.922 (Katalog Lokal sebesar Rp. 13.598.112.250, Sektoral sebesar Rp. 105.511.141.647 dan Nasional sebesar Rp. 16.948.313.025). Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 nilai e-Katalog hanya sebesar Rp. 128.251.762.096.

Adanya transaksi e-Katalog juga dipengaruhi oleh peran pelaku usaha untuk mendaftarkan produk-produk usahanya pada etalase produk melalui aplikasi e-katalog yang telah dibangun oleh LKPP. Realisasi Etalase, produk, dan penyedia yang telah terdaftar pada e-katalog sebagai berikut :

**Tabel 3.29.**

Realisasi Etalase dan Produk Tayang Tahun 2023

NO	Etalase	2022		2023	
		Produk	Penyedia	Produk	Penyedia
1	Alat dan atau Mesin Pertanian			34	2
2	Alat Tulis Kantor	247	13	541	24
3	Aspal				
4	Bahan Material	14	2	32	6
5	Bahan Pokok	6	1	1	1
6	Belanja Media			7	7
7	Benih Hortikultura			12	2
8	Benih Tanaman Pangan				
9	Bahan Precast				
10	Beton Ready Mix				
11	Hewan Ternak				
12	Jasa Keamanan			2	2
13	Jasa Kebersihan	12	2	12	3
14	Jasa Pengolahan Sampah				
15	Makanan dan Minuman	13	7	118	12
16	Pakaian Dinas dan Kain Tradisional	17	6	96	30
17	Seragam Sekolah	3	1	28	4
18	Servis Kendaraan	45	1		
19	Souvenir	138	2	169	7
20	Benih Tanaman Perkebunan				
21	Pemeliharaan Bangunan Gedung			1	1
22	Produk Furniture dan Meubelair			271	7
23	Jasa Pengiriman (Ekspedisi)			6	2
24	Peralatan Elektronik dan Pendukungnya			268	15
	<b>Total</b>	<b>495</b>	<b>35</b>	<b>1598</b>	<b>125</b>

**Keterangan :** Data Moneyv diolah dari aplikasi <https://redash-e-katalog.lkpp.go.id>

Elektronik Provinsi Papua tahun 2023 mengalami penambahan 5 (lima) etalase menjadi 24 (dua puluh empat) etalase yang sebelumnya 19 (sembilan belas) etalase pada tahun sebelumnya. Selain etalase, dari tahun 2022 sampai 2023 terjadi penambahan jumlah produk dan jumlah penyedia yang ikut berpartisipasi dalam Katalog Elektronik Lokal.

Keberhasilan atas komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam merealisasikan belanja E-Purchasing, sehingga pada Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa se-Tanah Papua Tahun 2023 di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Provinsi Papua menerima tanda apresiasi atas realisasi belanja E-Purchasing tertinggi Pemerintah Provinsi se-Tanah Papua dari Kepala LKPP-RI.



**Gambar 3.3.**

Penghargaan Tanda Apresiasi Realisasi E-Purchasing Tahun 2023

Selain belanja e-Katalog terdapat juga belanja melalui Toko Daring. Toko Daring merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Penyelenggaraan Perdagangan

melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang berbentuk marketplace dan ritel daring. Bela Pengadaan tidak termasuk dalam e-Purchasing melainkan merupakan Metode Pemilihan Pengadaan Langsung yang dilaksanakan berdasarkan cara pembelian/pembayaran langsung.

Realisasi belanja pengadaan barang/jasa Provinsi Papua Tahun 2023 dengan metode pelaksanaan toko daring adalah sebesar Rp. 21.299.999,- dan dibandingkan Tahun 2022 yang belum terlaksana. Belanja melalui Toko Daring dari 35 SKPD hanya dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua yaitu belanja Laptop sebagai berikut :

**Tabel 3.30.**

Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa  
melalui Toko Daring Tahun 2023

No.	Nama Satker	Nama Paket	Total Pelaksanaan (Rp)
1	BIRO LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Laptop MSI GF66	21.299.999

### **3. Capaian Kinerja Pengadaan Langsung Secara Elektronik**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua pasal 1 ayat 28 berbunyi Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Tahun 2023 proses pengadaan barang/jasa telah dilakukan dan terpusat dimana proses pemilihan di SKPD dilakukan oleh Pejabat Pengadaan yang merupakan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. Berdasarkan hasil monitoring

pengadaan langsung secara elektronik melalui aplikasi SPSE diketahui realisasi sebagai berikut :

**Tabel 3.31.**

Realisasi Pengadaan langsung Secara Elektronik Tahun 2023

No	Kategori	Jumlah Paket Selesai
1	Pekerjaan Konstruksi	90
2	Jasa Lainnya	56
3	Pengadaan Barang	203
4	Jasa Konsultansi Badan Usa Konstruksi	38
5	Jasa Konsultansi Badan Usa Konstruksi	35
	<b>Total</b>	<b>422</b>

*Keterangan : Data diolah dari aplikasi LPSE.Papua.go.id*

#### **4. Capaian Monitoring Center Preventif (MCP) KPK pada Area Pengadaan Barang dan Jasa**

Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi resiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dari 8 area yang salah satunya adalah area pengadaan barang dan jasa.

Hasil monitoring progress pelaksanaan aksi pencegahan korupsi tersebut digambarkan dalam warna merah, kuning, biru, dan hijau yang menggambarkan capaian aksi yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah pada 8 area intervensi dengan bobot masing masing. Merah, berarti implementasi rendah, dibawah 25%. Sebaliknya, yang berwarna hijau menunjukkan kemajuan implementasi yang baik, yaitu lebih dari 75%. Kemajuannya setiap sistem dihitung berdasarkan kemajuan dari setiap kriteria yang terukur dan seragam di sistem

tersebut.

Hasil penilaian MCP KPK pada area pengadaan barang dan jasa berdasarkan indikator MCP sebagai berikut :

**Tabel 3.32.**

Hasil Penilaian MCP KPK

Area Intervensi Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023

Indikator	Hasil Penilaian (%)	Hasil Capaian (%)
Inovasi Pelaksanaan Pengadaan	94,8	95,48
Pengendalian Pengadaan	91,6	
Penguatan Profesionalisme UKPBJ	100	

*Keterangan : Sumber data <https://jaga.id/>*

Dari tabel diatas, hasil capaian penilaian MCP KPK untuk area pengadaan barang dan jasa sebesar 95,48% yang artinya proses kinerja organisasi telah menunjukkan kemajuan implementasi yang baik.

Dari 3 indikator target MCP KPK area pengadaan barang/jasa terdapat 2 indikator yang belum mencapai 100%. Ini menunjukkan masih belum terpenuhinya eviden atau data dukung pada 2 indikator tersebut dan kedepannya menjadi perhatian Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua yaitu :

- a. Dokumen Hasil Reviu Pengadaan minimal berupa RUP Pemda Hasil Reviu Besama lengkap dengan Nama Pengadaan, jadwal sebelum dan sesudah reviu, metode pengadaan sebelum dan sesudah reviu, rencana kebutuhan masing masing paket pengadaan dll, di TTD oleh Sekda (dilengkapi dokumentasi kegiatan, data Jumlah Pengadaan melalui rekapitulasi jumlah Tender, Jumlah Pengadaan Pengadaan Langsung, Jumlah Penunjukan Langsung, Jumlah Paket E-Purchasing, Jumlah Paket Swakelola)
- b. Daftar Rencana Pengadaan Konsolidasi (minimal ada 5 pekerjaan) Penayangan SIRUP Penayangan SIRUP 100% per 31 Maret 2023

- c. Regulasi internal Pemda untuk mendorong kewajiban input e-PL sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran.
- d. Konsolidasi Pengadaan ( Daftar pengadaan yang kemudian dilakukan konsolidasi dilengkapi dengan: nama OPD, nama pengadaan, nilai HPS, jadwal pelaksanaan pengadaan konsolidasi, nama pemenang hasil konsolidasi, Nilai Pengadaan Hasil Konsolidasi (dibuat dalam tabel) dan Metode konsolidasi dapat berupa tender bersama atau penyatuan paket terpusat untuk kemudian di tenderkan.
- e. Lelang Dini pada PBJ Strategis (1. Daftar kegiatan Lelang Dini yang merupakan proyek strategis Pemda. 2. Daftar pelaksanaan Lelang Dini, pagu, HPS, dan daftar pemenang. Lelang Dini dilakukan sebelum APBD 2024 berjalan, sehingga dilaksanakan di tahun 2023. Reviu HPS juga sudah dilakukan di tahun 2023.

**D. Realisasi Anggaran**

Jumlah anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2023 pada APBD Induk sebesar Rp. 21.603.106.650,-menjadi Rp. 32.605.495.650,- pada APBD Perubahan atau bertambah sebesar 50,93%. Realisasi anggaran sebesar Rp. 31.854.209.521,- atau 97,70% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.33.**  
Realisasi Anggaran Tahun 2023

Rincian Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Belanja Pegawai	16.993.538.300	16.248.127.422	95,61
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	745.000.000	744.816.250	99,98
Belanja Barang dan Jasa	14.866.957.350	14.861.265.849	99,96
<b>Total</b>	<b>32.605.495.650</b>	<b>31.854.209.521</b>	<b>97,70</b>

*Keterangan : Sumber Laporan Keuangan Tahun 2023*

REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN APBD PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	BELANJA/JENIS PENGADAAN	LOKASI	PAGU DANA (RP)	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				SUMBER DANA
						KEUANGAN		KINERJA		
						(Rp.)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4-01.0-00.0-00.01.2000	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa		32.605.495.650			31.854.209.521	97,7			
4.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	21.530.188.300			20.784.605.171	96,54			
4.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	209.000.000			208.991.500	100			
4.01.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	80.000.000	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	79.992.000	99,99	3 Dokumen	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
4.01.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0,00	69.000.000	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	68.999.500	100	1 Dokumen	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
4.01.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	60.000.000	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	60.000.000	100	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
4.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	10.519.038.300			9.773.627.422	92,91			
4.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	10.378.038.300	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/ Bulan	9.632.627.422	92,82	73 Orang/ Bulan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua

4.01.001.1.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	111.000.000	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	111.000.000	100	1 Dokumen	100	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua
4.01.001.1.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,00	30.000.000	Jumlah dokumen laporan yang disusun	1 Dokumen	30.000.000	100	1 Dokumen	100	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua
<b>4.01.001.1.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000</b>			<b>20.000.000</b>	<b>100</b>			
4.01.001.1.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	20.000.000	Jumlah dokumen hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	100	1 Dokumen	100	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua
<b>4.01.001.1.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000.000</b>			<b>400.000.000</b>	<b>100</b>			
4.01.001.1.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	150.000.000	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yg mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 Orang	150.000.000	100	20 Orang	100	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua
4.01.001.1.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	250.000.000	Jumlah Sosialisasi	1 Kegiatan	250.000.000	100	1 Kegiatan	100	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua
<b>4.01.001.1.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>6.367.150.000</b>			<b>6.366.986.250</b>	<b>100</b>			
4.01.001.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	33.100.000	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	33.100.000	100	1 Paket	100	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua
4.01.001.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	204.000.000	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	1 Paket	204.000.000	100	1 Paket	100	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua
4.01.001.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	520.000.000	Jumlah dokumen kantor yang dicetak dan digandakan	2 Paket	520.000.000	100	2 Paket	100	Dana Otonomi Khusus-

										Provinsi Papua
4.01.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	60.000.000	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan yang disediakan	12 Bulan	60.000.000	100	12 Bulan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
4.01.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0,00	1.072.000.000	Jumlah paket penyediaan ATK	1 Paket	1.072.000.000	100	1 Paket	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
4.01.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	1.344.000.000	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	11.340 Porsi	1.344.000.000	100	11.340 Porsi	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
4.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	3.034.050.000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	3.034.050.000	100	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
4.01.001.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	100.000.000	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	99.836.250	99,84	1 Dokumen	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
<b>4.01.001.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>594.000.000</b>			<b>594.000.000</b>	<b>100</b>			
4.01.001.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	594.000.000	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Paket	594.000.000	100	2 Paket	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
<b>4.01.001.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871.000.000</b>			<b>2.870.999.999</b>	<b>100</b>			
4.01.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	321.000.000	Terlayannya pelaksanaan surat menyurat	12 Bulan	321.000.000	100	12 Bulan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua

4.01.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	75.000.000	Tersediaannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	74.999.999	100	12 Bulan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
4.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	2.475.000.000	Tersediaannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	2.475.000.000	100	12 Bulan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
<b>4.01.001.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000.000</b>			<b>550.000.000</b>	<b>100</b>			
4.01.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	400.000.000	Tersediaannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	400.000.000	100	12 Bulan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
4.01.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	150.000.000	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	26 Unit	150.000.000	100	26 Unit	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
<b>4.01.007</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.075.307.350</b>		<b>0</b>	<b>11.069.604.350</b>	<b>99,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.01.007.1.01</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>0,00</b>	<b>7.657.107.350</b>			<b>7.657.087.350</b>	<b>100</b>			
4.01.007.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.252.457.350	Jumlah laporan hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1.252.457.350	100	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
4.01.007.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	5.939.000.000	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	5.938.980.000	100	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
4.01.007.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	465.650.000	Jumlah laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	465.650.000	100	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
<b>4.01.007.1.02</b>	<b>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.400.000</b>			<b>2.157.717.000</b>	<b>99,74</b>			

4.01.007.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	0,00	1.378.400.000	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	1.377.717.000	99,95	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua
4.01.007.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	455.000.000	Jumlah laporan hasil Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	450.000.000	98,9	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua
4.01.007.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	330.000.000	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	330.000.000	100	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua
<b>4.01.007.1.03</b>	<b>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.800.000</b>			<b>1.254.800.000</b>	<b>100</b>			
4.01.007.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	504.800.000	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	504.800.000	100	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua
4.01.007.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	400.000.000	Jumlah dokumen hasil Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	400.000.000	100	1 Dokumen	100	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua
4.01.007.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	350.000.000	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	350.000.000	100	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua
<b>JUMLAH</b>			<b>32.605.495.650</b>			<b>31.854.209.521</b>	<b>97,7</b>		<b>100</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen, masyarakat, dan dunia usaha.

Capaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2023 dapat dinyatakan “berhasil”, karena realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 126,70% dengan rincian:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 4 target; dan
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 2 target:

Selain itu, secara keseluruhan capaian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan.

Pelaksanaan program/kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2023 dalam mewujudkan pencapaian sasaran kinerja sangat dipengaruhi anggaran. Realisasi anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 31.854.209.521,- atau 97,70% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 32.605.495.650,-.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya beberapa indikator sasaran kinerja akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah khususnya kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

# LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2019-2023**

**Perjanjian Kinerja (PK)  
Kepala SKPD Tahun 2023**

**Jenis Penghargaan  
Yang di Terima Tahun 2023**

**LAMPIRAN**



# SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

## BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Alamat : Jl. Soa Sio Lantai II Kantor Guernur Papua Email: [Pegadaan@papua.go.id](mailto:Pegadaan@papua.go.id)

### KEPUTUSAN

**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA**  
**NOMOR : 188.4/344a/RO-PBJ/2021**

### TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA**  
**TAHUN 2019 - 2023**

### KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengukuran Kinerja perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua dengan Keputusan Kepala Biro.
- Mengingat : 1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
15. Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
17. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Periode 2019 – 2023 sebagaimana terlampir;
- Kedua : IKU Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;
- Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2023 masa berakhirnya RPJMD Provinsi Papua dan masa berakhirnya Renstra SKPD Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 19 Februari 2021

KEPALA BIRO,  
PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SETDA PROVINSI PAPUA



YOREM B. WANIMBO, S.Pi, MM  
PEMBINA  
NIP. 19700118 199203 1 006

Lampiran I  
Keputusan Kepala Biro Pengadaaan Barang dan Jasa  
Nomor : **188.4/344a/RO-PBJ/2021**  
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

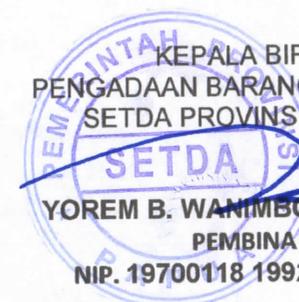
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA  
PERIODE 2019 – 2023**

1. Instansi : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua
2. Tugas Pokok dan Fungsi : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyusunan rencana kerja Biro;
  - b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
  - d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
  - e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengembangan pengelolaan Sistem Layan`an Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
  - f. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan analisis hukum dan jawaban terhadap sanggahan calon penyedia barang dan jasa Pemerintah Daerah;
  - g. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
  - h. Penyelenggaraan ketatausahaan Biro;
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro; dan
  - j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa yang memenuhi kaidah Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Persentase Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	$\frac{\text{Jumlah paket selesai tender/seleksi}}{\text{Jumlah dokumen yang diproses}} \times 100\%$	Bagian Pengadaan barang dan Jasa	LPSE, Pokja
		Persentase efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilihan PBJ	$\frac{\text{Jumlah Hasil Negosiasi}}{\text{Jumlah Harga Perkiraan Sendiri (HPS)}} \times 100\%$	Bagian Pengadaan barang dan Jasa	LPSE, Summary report Pokja
		Persentase Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Aplikasi lokal PBJ	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)}}{\text{Jumlah total SKPD}} \times 100\%$	Bagian LPSE/ Bagian Pengadaan barang dan Jasa	Aplikasi singa2.papua.g o.id dan aplikasi Sirup LKPP
			$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha Papua yang terdaftar dalam aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP)}}{\text{Jumlah total pelaku usaha papua yang terdaftar dalam aplikasi pelaku Usaha Papua}} \times 100\%$	Bagian LPSE	Aplikasi Pelaku Usahapapua.g o.id
2	Meningkatnya Profesional SDM Biro PBJ	Persentase keterisian Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	$\frac{\text{Jumlah ASN yang lulus ujian jabatan fungsional PBJ}}{\text{Jmlh formasi jabatan fungsional}} \times 100\%$	Bagian Pembinaan SDM dan Advokasi PBJ	Hasil Ujian Kompetensi
		Persentase Sanggahan/pengaduan yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sanggahan yang terselesaikan}}{\text{Jmlh paket tender/seleksi yang disanggah}} \times 100\%$	Bagian Pembinaan SDM dan Advokasi PBJ	Jawaban sanggah
3	Meningkatnya Auntabilitas Kinerja Biro PBJ Prov.Papua	Hasil SAKIP Biro PBJ Setda Prov.Papua	Nilai dan Predikat SAKIP Biro PBJ Setda Prov.Papua	Inspektorat Prov.Papua	Inspektorat Prov.Papua

Jayapura, 19 Februari 2021


 KEPALA BIRO  
 PENGADAAN BARANG DAN JASA  
 SETDA PROVINSI PAPUA  
 YOREM B. WANIMBO, S.Pi., MM  
 PEMBINA  
 NIP. 19700118 199203 1 006

# SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

## BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DEBORA D. SALOSA, S.HUT., MM**  
Jabatan : **KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM**  
Jabatan : **Pih. GUBERNUR PAPUA**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, 30 Maret 2023

PIHAK KEDUA,

Pih. GUBERNUR PAPUA

  
**DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM**

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIRO  
PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SETDA PROVINSI PAPUA

  
**DEBORA D. SALOSSA, S.HUT., MM**  
NIP. 19771223 200212 2 010

**PERJANJIAN KINERJA (PK)**

Nama SKPD : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua  
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Program dan Kegiatan
1	Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa yang memenuhi kaidah Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Meningkatnya Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	100	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa a. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa b. Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	4.233.657.000 4.233.657.000 3.109.000.000 1.124.657.350
		Terpenuhinya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilihan PBJ	Persen	6	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa a. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik a. Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	536.000.000 350.000.000 350.000.000 186.000.000 186.000.000
2	Meningkatnya pemanfaatan layanan SPSE pengadaan secara eletronik	Meningkatnya Penggunaan SPSE dan Aplikasi lokal PBJ	Persen	100	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik a. Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik b. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.345.400.000 1.345.400.000 890.400.000 455.000.000
3.	Meningkatnya Profesional SDM pengelola PBJ	Meningkatnya keterisian Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	Persen	60	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa a. Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000.000 350.000.000 350.000.000
		Mempertahankan Tingkat Kematangan UKPJ	Level	3	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa a. Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	350.000.000 350.000.000 350.000.000
		Terelesesaikannya Sanggahan/ pengaduan penyedia	Persen	100	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa a. Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	350.000.000 350.000.000 350.000.000
4	Meningkatnya Auntabilitas Kinerja Biro PBJ Prov.Papua	Hasil SAKIP Biro PBJ Setda Prov.Papua	Nilai SAKIP	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000
<b>Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis</b>						<b>7.255.057.350</b>

Jumlah anggaran untuk keseluruhan program baik program Utama dan program Pendukung (rutin) adalah :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA (APBD/APBN)
1.	<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>7.115.057.350,00</b>	
	a. Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa b. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa c. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa d. Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik e. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa f. Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa g. Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa h. Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa i. Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1.124.657.350,00 3.109.000.000,00 350.000.000,00 890.400.000,00 455.000.000,00 186.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00	Dana Otsus
2.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>14.488.049.300,00</b>	
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran g. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD h. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.000.000,00 69.000.000,00 60.000.000 5.640.049.300,00 60.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 150.000.000,00 30.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

j.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
k.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	520.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
l.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
m.	Penyediaan Bahan/Material	1.072.000.000,00	Dana Otsus
n.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.344.000.000,00	Dana Otsus
o.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.809.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
p.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	594.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
q.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	321.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
r.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
s.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.004.000.000,00	Dana Otsus
t.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	499.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
u.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

**Jumlah anggaran keseluruhan program Rp. 21.603.106.650,00**

Jayapura, 30 Maret 2023

PIHAK KEDUA,

Pih. GUBERNUR PAPUA

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIRO  
PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SETDA PROVINSI PAPUA

DEBORA D. SALOSA, S.HUT., MM  
NIP. 19771223 200212 2 010



PENGHARGAAN TANDA APRESIASI  
YANG DITERIMA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023  
KATEGORI REALISASI E-PURCHASING TERTINGGI  
PEMERINTAH PROVINSI SE-TANAH PAPUA TAHUN 2023



PENGHARGAAN TANDA APRESIASI  
YANG DITERIMA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023  
KATEGORI INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP) "BAIK"  
PEMERINTAH PROVINSI SE-TANAH PAPUA TAHUN 2023



**LAPORAN KINERJA**  
**PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN APBD PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023**  
**KEADAAN DESEMBER 2023**

SKPD : 4-01.0-00.0-00.01.2000 - BIRO LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE	BELANJA/ JENIS PENGADAAN	LOKASI	PAGU DANA (RP)	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				SUMBER DANA	KET
						KEUANGAN		KINERJA			
						( Rp. )	( % )	( % )	( % )		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4-01.0-00.0-00.01.2000	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa		32.605.495.650			31.854.209.521	97,7				
4.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		21.530.188.300			20.784.605.171	96,54				
4.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		209.000.000			208.991.500	100				
4.01.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		80.000.000	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	79.992.000	99,99	3 Dokumen	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		69.000.000	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	68.999.500	100	1 Dokumen	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		60.000.000	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	60.000.000	100	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.519.038.300			9.773.627.422	92,91				
4.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		10.378.038.300	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/ Bulan	9.632.627.422	92,82	73 Orang/ Bulan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		111.000.000	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	111.000.000	100	1 Dokumen	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.001.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		30.000.000	Jumlah dokumen laporan yang disusun	1 Dokumen	30.000.000	100	1 Dokumen	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		20.000.000			20.000.000	100				
4.01.001.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		20.000.000	Jumlah dokumen hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	100	1 Dokumen	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		400.000.000			400.000.000	100				
4.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		150.000.000	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yg mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 Orang	150.000.000	100	20 Orang	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	

KODE	BELANJA/ JENIS PENGADAAN	LOKASI	PAGU DANA (RP)	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				SUMBER DANA	KET
						KEUANGAN		KINERJA			
						( Rp. )	( % )	( % )	( % )		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.001.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		250.000.000	Jumlah Sosialisasi	1 Kegiatan	250.000.000	100	1 Kegiatan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.001.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		6.367.150.000			6.366.986.250	100				
4.01.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		33.100.000	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	33.100.000	100	1 Paket	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		204.000.000	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	1 Paket	204.000.000	100	1 Paket	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		520.000.000	Jumlah dokumen kantor yang dicetak dan digandakan	2 Paket	520.000.000	100	2 Paket	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		60.000.000	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan yang disediakan	12 Bulan	60.000.000	100	12 Bulan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		1.072.000.000	Jumlah paket penyediaan ATK	1 Paket	1.072.000.000	100	1 Paket	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		1.344.000.000	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	11.340 Porsi	1.344.000.000	100	11.340 Porsi	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3.034.050.000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	3.034.050.000	100	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.001.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100.000.000	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	99.836.250	99,84	1 Dokumen	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.001.1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		594.000.000			594.000.000	100				
4.01.001.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		594.000.000	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Paket	594.000.000	100	2 Paket	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.001.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		2.871.000.000			2.870.999.999	100				
4.01.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		321.000.000	Terlayannya pelaksanaan surat menyurat	12 Bulan	321.000.000	100	12 Bulan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		75.000.000	Tersediaannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	74.999.999	100	12 Bulan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.475.000.000	Tersediaannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	2.475.000.000	100	12 Bulan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.001.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		550.000.000			550.000.000	100				

KODE	BELANJA/ JENIS PENGADAAN	LOKASI	PAGU DANA (RP)	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				SUMBER DANA	KET
						KEUANGAN		KINERJA			
						( Rp. )	( % )	( % )	( % )		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		400.000.000	Tersediaanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	400.000.000	100	12 Bulan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		150.000.000	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	26 Unit	150.000.000	100	26 Unit	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.007	<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>		11.075.307.350		0	11.069.604.350	99,95	0	0		
4.01.007.1.01	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>		7.657.107.350			7.657.087.350	100				
4.01.007.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		1.252.457.350	Jumlah laporan hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1.252.457.350	100	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.007.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		5.939.000.000	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	5.938.980.000	100	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.007.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		465.650.000	Jumlah laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	465.650.000	100	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.007.1.02	<b>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>		2.163.400.000			2.157.717.000	99,74				
4.01.007.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		1.378.400.000	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	1.377.717.000	99,95	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.007.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		455.000.000	Jumlah laporan hasil Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	450.000.000	98,9	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.007.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		330.000.000	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	330.000.000	100	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.007.1.03	<b>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>		1.254.800.000			1.254.800.000	100				
4.01.007.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		504.800.000	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	504.800.000	100	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.007.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa		400.000.000	Jumlah dokumen hasil Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	400.000.000	100	1 Dokumen	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4.01.007.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		350.000.000	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	350.000.000	100	1 Laporan	100	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	

KODE	BELANJA/ JENIS PENGADAAN	LOKASI	PAGU DANA (RP)	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				SUMBER DANA	KET
						KEUANGAN		KINERJA			
						( Rp. )	( % )	( % )	( % )		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	JUMLAH		32.605.495.650			31.854.209.521	97,7		100		

Jayapura, 29 January 2024  
Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa

Debora D Salossa, S.Hut.,MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP : 197712232002122010